

Arahan Pengembangan Wilayah Kedungsepur Melalui Interaksi Keruangan Antar Kabupaten-Kota

Nur 'Izzatul Hikmah✉ Ariyani Indrayati

Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Februari 2021

Disetujui April 2021

Dipublikasikan Mei 2021

Keywords:

Base Sector Trends,

Potential Locations,

Regional Development

Analysis

Abstrak

Kedungsepur ditetapkan dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dalam pengembangannya membutuhkan interaksi keruangan dan penyebaran sektor basis antar Kota-Kabupaten yaitu Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga dan Kabupaten Grobogan. Tujuan penelitian ini adalah: (1) mengetahui kecenderungan sektor yang merupakan basis di masing-masing kabupaten/kota di Kedungsepur, (2) menganalisis konektivitas antar wilayah di Kedungsepur, (3) mengetahui lokasi potensial untuk optimalisasi interaksi keruangan antar wilayah di Kedungsepur. Metode yang digunakan adalah analisis LQ (*Location Quotient*) selama tahun 2015 – 2019, indeks konektivitas, indeks aksesibilitas dan menentukan lokasi menggunakan analisis model Gravitasi dan teori titik henti (*breaking point*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sektor basis di Kedungsepur memiliki kecenderungan sektor yang berbeda di Kabupaten – Kotanya dalam lima tahun terakhir. Konektivitas wilayah di Kedungsepur menunjukkan bahwa Kedungsepur merupakan wilayah maju. Lokasi potensial di Kedungsepur berdasarkan analisis dan hasil perhitungan teori titik henti (*breaking point*) adalah Kabupaten Kendal di Kecamatan Kendal, Kecamatan Singorojo, Kecamatan Boja dan Kecamatan Limbangan; Kabupaten Demak di perbatasan antara Kecamatan Demak dan Kecamatan Wonosalam; Kabupaten Semarang di Kecamatan Ungaran Barat; Kota Semarang di Kecamatan Banyumanik; dan Kabupaten Grobogan di Kecamatan Purwodadi.

Abstract

Kedungsepur is stipulated in Provinsi Jawa Tengah as the National Activity Center based on RTRW, the development requiring spatial interaction and spreading of the base sector between cities: Kendal Regency, Demak Regency, Semarang Regency, Salatiga City and Grobogan Regency. The objectives of this research are: (1) knowing the sector trends which are the basis in each district / city in Kedungsepur, (2) analyzing connectivity between regions in Kedungsepur, (3) knowing potential locations for optimizing spatial interactions between regions in Kedungsepur. The method used is the analysis of LQ (*Location Quotient*) during 2015 - 2019, connectivity index, accessibility index and location determination using Gravity model analysis and breaking point theory. The results show that the base sector in Kedungsepur has a tendency for different sectors in its districts in the past five years. Regional connectivity shows that Kedungsepur is a developed region. Potential locations in Kedungsepur based on the analysis and calculation results of the breaking point theory are Kendal Regency in Kendal District, Singorojo District, Boja District and Limbangan District; Demak Regency on the border between Demak District and Wonosalam District; Semarang Regency in Ungaran Barat District; Semarang City in Banyumanik District; and Grobogan Regency in Purwodadi District.

© 2021 Universitas Negeri Semarang

✉ Alamat korespondensi:

Gedung C1 Lantai 2 FIS Unnes

Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229

E-mail: geografiunnes@gmail.com

ISSN 2252-6285

PENDAHULUAN

Kawasan metropolitan naik secara signifikan. Tingginya pertumbuhan penduduk tersebut berhubungan dengan naiknya pertumbuhan ekonomi. Hal ini menyebabkan terbentuknya formasi “*Extended Metropolitan Region*” (EMR) yang dapat dilihat dari pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kota inti yang melebar menuju kawasan di sekelilingnya atau biasa disebut dengan metropolitanisasi.

Fenomena metropolitan di Indonesia yang juga diatur sebagai Pusat Kegiatan Nasional oleh Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 adalah pertumbuhan kawasan Kedungsepur (Kendal, Demak, Ungaran, Semarang, Salatiga, Purwodadi).

Kedungsepur merupakan indikasi bahwa kota inti yaitu Kota Semarang dan daerah di sekelilingnya seperti Kendal, Demak, Ungaran, Kota Salatiga, Purwodadi merupakan “*region*

based urbanization”. Hal ini menunjukkan bahwa setiap perubahan yang terjadi di Kota Semarang akan berpengaruh terhadap daerah di sekelilingnya. Dewasa ini, Kota Semarang juga memiliki hubungan antara urbanisasi dengan faktor-faktor sosial, ekonomi, demografi, politik atau kebijakan pembangunan kota dan perubahan fisik keruangan di Kedungsepur. Hasil analisis tersebut dapat digunakan sebagai landasan untuk pengambilan keputusan dalam arahan pengembangan melalui interaksi keruangan untuk mengurangi ketimpangan yang terjadi Kawasan Kedungsepur.

Fakta yang ditemukan adalah bahwa terjadi ketimpangan di wilayah Kedungsepur yang ditunjukkan oleh nilai PDRB per kapita tiap Kabupaten/Kota. Kesejahteraan masyarakat di Kedungsepur akan semakin baik jika PDRB per kapitanya semakin tinggi begitu pula sebaliknya, sehingga kota inti (Kota Semarang) memiliki ketimpangan dengan wilayah di sekelilingnya (Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Purwodadi). Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. PDRB Per Kapita Wilayah Kedungsepur Tahun 2017 dalam Rupiah.

Kabupaten / Kota	PDRB Per Kapita	Persentase
Kabupaten Kendal	28.824.874,82	14.26
Kabupaten Demak	14.498.063,87	7.17
Kabupaten Semarang	31.084.761,00	15.37
Kota Semarang	69.409.689,79	34.33
Kota Salatiga	45.461.810,85	22.49
Kabupaten Grobogan	12.904.456,25	6.38
TOTAL	202.183.656,58	100

Sumber : BPS Jawa Tengah dalam Sanditia, dkk (2017), diolah 2020.

Kedungsepur yang telah ditetapkan dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dalam pengembangannya membutuhkan interaksi keruangan dan penyebaran sektor basis antar Kota-Kabupaten agar tidak terjadi ketimpangan yang berat antara Kota inti yaitu Kota Semarang dengan Kabupaten – Kota *hinterland* nya yaitu Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga dan Kabupaten Grobogan. Keruangan antar wilayah Kedungsepur memiliki ketersediaan cadangan

lahan yang menjadi potensi dalam arahan pengembangannya dan akan mendapatkan keuntungan jika terjadi peningkatan pengembangan (Giyarsih, 2012). Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Menganalisis kecenderungan sektor yang merupakan basis di masing-masing kabupaten/kota di Kedungsepur. (2) Menganalisis konektivitas antar wilayah dengan mempertimbangkan aktivitas manusia di Kedungsepur. (3) Mengetahui lokasi potensial untuk optimalisasi interaksi keruangan antar wilayah di Kedungsepur.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan metode analisis data sekunder untuk mengetahui arahan pengembangan wilayah di Kedungsepur. Hal pertama yang dilakukan dalam penelitian ini didasarkan pada ketimpangan wilayah di Kedungsepur yang dianalisis menggunakan Indeks Williamson (Muta'ali, 2015).

$$IW = \frac{\sqrt{\sum \frac{(Y_i - Y)^2 f_i}{n}}}{Y}$$

Keterangan:

Y_i = PDRB Per kapita Kabupaten / Kota di Kedungsepur,

Y = PDRB Per kapita rata-rata Provinsi Jawa Tengah,

f_i = Jumlah penduduk Kabupaten / Kota di Kedungsepur dan

n = Jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah.

dengan kriteria ketimpangan Wilayah (IW) : < 0.35 = Ringan, $0.35 - 0.50$ = Sedang, dan > 0.5 = Berat. Tujuan penelitian yang akan dicapai yaitu (1) Mengoptimalkan keberlangsungan sektor yang merupakan basis di masing-masing kabupaten/kota di Kedungsepur menggunakan analisis *Location Quotient*,

$$LQ_{ij} = \frac{X_{ij}/X_i}{RV_j/RV}$$

Keterangan:

LQ_{ij} = Indeks Koefisien *Location Quotient* sektor i di Kabupaten/Kota Kedungsepur,

X_{ij} = PDRB sektor i di Kabupaten/Kota Kedungsepur

X_i = PDRB sektor i di Jawa Tengah,

RV_j = Total PDRB di Kabupaten/Kota Kedungsepur,

RV = Total PDRB di Jawa Tengah

dengan kriteria $LQ > 1$ = Sektor basis dan unggulan, $LQ < 1$ = Sektor non basis dan non unggulan, $LQ = 1$ = Sektor seimbang dengan wilayah acuan. (2) Meningkatkan transfer keruangan antar wilayah di Kedungsepur menggunakan analisis indeks konektivitas :

$$\beta = \frac{e}{v}$$

Keterangan :

β = Indeks Konektivitas

e = Jumlah Jaringan Jalan yang menghubungkan Kabupaten / Kota

v = Jumlah kota dalam satu wilayah.

Kriteria nilai indeks konektivitas (Beta) (Muta'ali, 2015) adalah jika $\beta > 1$ maka menunjukkan *advanced economies* (wilayah maju), sedangkan jika nilai $\beta < 1$ maka menunjukkan *backward economies* (wilayah terbelakang dan belum berkembang). dan analisis indeks aksesibilitas:

$$a = \frac{d_{ij}}{d_j}$$

Keterangan :

a = Indeks Aksesibilitas

D_{ij} = Jarak terdekat wilayah Kota inti (Kota Semarang) menuju wilayah kota di sekitarnya/hinterland (Kedungsepur selain Kota Semarang).

D_j = Rata-rata jarak menuju Kota inti (Kota Semarang).

(3) Menentukan lokasi yang dapat memberikan kesempatan antara (*intervening opportunity*) antar wilayah di Kedungsepur menggunakan Model Gravitasi :

$$I_{ij} = \frac{M_1 \times M_2}{(J_{1 \times 2})^2}$$

Keterangan :

I_{ij} = Interaksi antara Kota inti (Kota Semarang) dan Kota Kota *hinterland* (Kendal, Demak, Ungaran, Kota Salatiga dan Purwodadi).

M_1 = Masa wilayah Kota inti (Jumlah penduduk Kota Semarang).

M_2 = Masa wilayah Kabupaten / Kota hinterland (Kendal, Demak, Ungaran, Kota Salatiga dan Purwodadi).

J = Jarak antar wilayah kota inti yaitu Kota Semarang dan Kota hinterland

Klasifikasi aksesibilitas dan interaksi antara kota inti dengan kabupaten – kota *hinterland* di Kedungsepur dilakukan dengan menentukan tiga tingkatan klasifikasi. Penentuan

klasifikasi aksesibilitas dan interaksi antar kabupaten kota di Kedungsepur yaitu terdiri dari aksesibilitas dan interaksi klasifikasi tinggi, sedang dan rendah. Hal ini diukur melalui formulasi interval antar kelas sebagai berikut (Hikmah, 2018):

$$I = \frac{(\text{Nilai tertinggi} - \text{Nilai Terendah})}{\text{Jumlah kelas}}$$

dan teori titik henti (*breaking point*) dalam menentukan lokasi potensial menggunakan formulasi sebagai berikut.

$$D_{AB} = \frac{d_{AB}}{1 + \sqrt{\frac{P_A}{P_B}}}$$

Keterangan :

- DAB = Jarak titik henti .
 dAB = Jarak wilayah A dan B.
 PA = Jumlah penduduk kota A.
 PB = Jumlah penduduk kota B.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kedungsepur sebagai salah satu wilayah Pusat Kegiatan Nasional sekaligus suatu kawasan yang memiliki fungsi khusus dalam pengembangan wilayah perkotaan, ternyata menunjukkan kesenjangan dan ketimpangan wilayah antar Kabupaten / Kota yaitu sebesar 0.68 (Olah data Penulis, 2020) yang didapat melalui perhitungan Indeks Williamson. Angka tersebut menunjukkan kondisi Kedungsepur termasuk kedalam kriteria kesenjangan berat yang dialami antar Kabupaten-Kotanya. Hasil analisis perhitungan Indeks Williamson mengenai kesenjangan wilayah di Kedungsepur pada tahun 2019 menunjukkan bahwa Kedungsepur memerlukan suatu arahan pengembangan, dimana sektor – sektor basis atau unggulan di Kedungsepur harus dikembaangkan dengan lebih baik sehingga distribusi dari potensi setiap daerah bisa terbagi dengan rata. Maka dari itu penulis melakukan analisis perhitungan sektor basis di Kedungsepur menggunakan indeks Location Quotient (LQ) untuk mengetahui kecenderungan sektor yang menjadi basis di

Kedungsepur selama lima tahun terakhir (2015 – 2019).

Penelitian berfokus pada identifikasi arahan pengembangan wilayah di Kedungsepur dalam rangka mengatasi ketimpangan wilayah antar Kawasan *Hinterland* dan Kota Inti. Konsep pengembangan wilayah di Indonesia berlandaskan pada beberapa teori yang meliputi konsep bongkar pasang pengembangan wilayah (Hariyanto dan Tukidi, 2007).

Sejalan dengan konsep tersebut maka arahan pengembangan wilayah yang penulis lakukan untuk Perkotaan Kedungsepur akan didasari kajian tentang sektor basis di Kedungsepur, konektivitas, interaksi dan aksesibilitas di Kedungsepur sehingga di dapatkan arahan lokasi yang potensial untuk pengembangan wilayah ataupun untuk pembangunan kawasan industri yang baru. Hal pertama yang dapat dilakukan dalam pengembangan wilayah di Kedungsepur adalah dengan mengidentifikasi sektor unggulan pada wilayah ini. Sektor unggulan adalah sektor yang memiliki keunggulan dan kemampuan yang tinggi sehingga bisa dijadikan harapan dalam pengembangan wilayah (Robingaton, dkk, 2014). Kecenderungan sektor basis tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Setelah kecenderungan sektor basis di Kedungsepur diketahui, kemudian dilakukan perhitungan mengenai konektivitas antar Kabupaten – Kota di Kedungsepur menggunakan analisis indeks konektivitas (indeks beta). Semakin tinggi nilai indeks maka semakin banyak jaringan jalan terhubung antar kabupaten – kota., sedangkan jika Hasil dari Konektivitas antar wilayah di Kedungsepur menunjukkan bahwa Kedungsepur merupakan wilayah maju. Kabupaten – Kota di Kedungsepur memiliki kriteria nilai indeks Beta $\beta > 1$, yang berarti bahwa indeks ini menyatakan bahwa Kedungsepur merupakan *advanced economies* (wilayah maju). Selengkapnya nilai indeks konektivitas wilayah di Kedungsepur adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Kecenderungan Sektor Basis antar Kabupaten-Kota Kedungsepur.

Sektor Basis di Kabupaten – Kota Kedungsepur						
Lapangan Usaha (Sektor)	Kab. Kendal	Kab. Demak	Kab. Sema- rang	Kota Sala- tiga	Kota Sema- rang	Kab. Grobo-gan
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	√	√	√	-	-	√
B. Pertambangan dan Penggalian	√	√	-	-	-	√
C. Industri Pengolahan	√	√	√	√	-	-
D. Pengadaan Listrik dan Gas	√	-	-	√	-	-
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-	-	-	-	√	-
F. Konstruksi	-	-	-	-	√	-
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-	√	-	-	√	√
H. Transportasi dan Pergudangan	-	-	-	√	√	√
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-	-	-	√	-	√
J. Informasi dan Komunikasi	-	-	-	-	√	-
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	√	-	-	-	√	√
L. Real Estate	-	-	√	√	√	-
M,N. Jasa Perusahaan	-	-	-	√	√	-
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	√	-	√	√	√
P. Jasa Pendidikan	-	√	√	√	-	√
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-	-	-	√	-	√
R,S,T,U. Jasa lainnya	-	√	-	-	-	√

Sumber : Olah Data, 2020

Tabel 3. Indeks Konektivitas antar Kabupaten – Kota Kedungsepur

No.	Kabupaten / Kota	e	v	Konektivitas	Ket. Wilayah
1.	Kabupaten Kendal	9	7	1.29	Maju
2.	Kabupaten Demak	5	5	1.00	Maju
3.	Kabupaten Semarang	11	9	1.22	Maju
4.	Kota Salatiga	4	1	4.00	Maju
5.	Kota Semarang	6	2	3.00	Maju
6.	Kabupaten Grobogan	9	8	1.13	Maju

Sumber: Analisis Peta Jaringan Jalan Kedungsepur (diolah, 2020).

Setelah melakukan perhitungan indeks konektivitas di Kedungsepur, kemudian dilakukan perhitungan untuk menganalisis aksesibilitas menggunakan indeks aksesibilitas di Kedungsepur. Indeks aksesibilitas wilayah merupakan nilai aksesibilitas suatu daerah dibandingkan dengan daerah yang lain dalam satu wilayah observasi (Hadi, dkk, 2013). Indeks aksesibilitas memperhitungkan jarak antara kota

inti dengan kota lainnya yang dapat diakses melalui jarak tertentu. Nilai indeks inilah yang dijadikan dasar dalam pengklasifikasian aksesibilitas antar wilayah Kabupaten – Kota (*hinterland*) dengan Kota Inti di Kedungsepur. Klasifikasi aksesibilitas dihitung menggunakan formulasi kelas interval (Hikmah, 2018) sehingga didapatkan klasifikasi aksesibilitas di Kedungsepur menjadi klasifikasi tinggi, sedang dan rendah.

Klasifikasi aksesibilitas di Kedungsepur menunjukkan adanya tingkatan aksesibilitas yang antar wilayah Kabupaten – Kota Kedungsepur dapat dilihat pada tabel 4 yang didukung dengan visualisasi pada peta yang menunjukkan tingkat aksesibilitas antar Kabupaten – Kota Kedungsepur yang dapat dilihat pada gambar di Lampiran 1.

Tabel 4. Indeks Aksesibilitas antar Kabupaten – Kota Kedungsepur.

Kabupaten / Kota	Luas (km ²)	Kedungsepur (%)	Jarak ke Kota Inti (km)	Indeks Aksesibilitas	Klasifikasi aksesibilitas
1. Kab. Kendal	1118.13	20.65	25	0.91	Sedang
2. Kab. Demak	900.12	16.63	27	0.99	Sedang
3. Kab. Semarang	950.21	17.55	15	0.55	Tinggi
4. Kota Salatiga	57.36	1.06	39	1.43	Rendah
5. Kota Semarang	373.78	6.90	2	0.07	Tinggi
6. Kab. Grobogan	2013.86	37.20	56	2.05	Rendah
Rata – rata Kedungsepur			27.33		1.00

Selain sektor basis, konektivitas dan aksesibilitas antar Kabupaten – Kota di Kedungsepur, interaksi antara kota inti dengan kabupaten – kota *hinterland* di Kedungsepur juga mempengaruhi arahan pengembangan wilayah di Kedungsepur. Interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap perilaku dari pihak - pihak yang bersangkutan melalui kontak langsung (Roucek, 1963). Pendapat yang berbeda berdasarkan geografi perkotaan menurut Short (1984), mengemukakan bahwa interaksi merupakan sistem perkotaan dan tatanan dari kota - kota kecil melalui aliran manusia, barang dan gagasan. Hal ini dapat disebut sebagai dinamika sistem perkotaan yang merupakan sistem pergerakan manusia pada suatu area dalam melakukan aktivitasnya, sebagai contoh yaitu perjalanan belanja dan perjalanan ke tempat kerja.

Selain itu aktivitas pergerakan manusia juga berpengaruh pada pola persebaran keruangan, transportasi (angkutan umum) dan daya lahan pada suatu fasilitas kependudukan perkotaan (Umam, dkk, 2012; Febrianto, dkk, 2017; Rofiatul, dkk, 2018). Hal ini juga berlaku pada kawasan perkotaan Kedungsepur, dimana transportasi mempengaruhi aktivitas pergerakan manusia. Fakta menunjukkan bahwa pada umumnya alasan pergerakan manusia adalah alasan ekonomi dimana penduduk cenderung

bergerak apabila terdapat prospek pekerjaan (gaji) yang lebih baik, alasan lainnya dalam bentuk sosial, seperti kurangnya pelayanan sosial yang miskin dan kurangnya kebebasan individu (Mustafa, dkk, 2018).

Pergerakan manusia yang merupakan salah satu bentuk interaksi yang juga dapat diketahui pola distribusi keruangan perkotaan (Indrayati, 2010b; Indrayati, 2011b; Falah dan Indrayati, 2019) antar wilayah juga terjadi di Kedungsepur. Kota Semarang sebagai kota inti yang menjadi pusat tujuan Kabupaten – Kota di sekitarnya (*hinterland*) yaitu Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga dan Kabupaten Grobogan untuk melakukan interaksi. Hal ini disebut sebagai daya tarik (gravitasi) yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk dan jarak antar wilayah di Kedungsepur.

Perhitungan nilai interaksi menggunakan formulasi model gravitasi, dimana semakin tinggi nilai interaksi, maka semakin tinggi pula pergerakan manusia dari dan menuju kota inti (Fachrurrizal dan Hayati, 2014). Hal ini juga berlaku pada nilai interaksi keruangan di Kedungsepur dengan Kota Semarang sebagai kota inti. Klasifikasi interaksi Kabupaten / Kota (*hinterland*) di Kedungsepur terhadap Kota Semarang (kota inti) menunjukkan Kabupaten Semarang memiliki interaksi yang tertinggi dengan Kota Semarang, Kabupaten Kendal dan

Demak memiliki klasifikasi interaksi (*hinterland*) di Kedungsepur terhadap Kota sedang, dan Kota Salatiga serta Kabupaten Semarang (kota inti) pada tahun 2019 dapat Grobogan memiliki klasifikasi interaksi rendah. dilihat pada tabel 5. Nilai dan klasifikasi interaksi Kabupaten / Kota

Tabel. 5. Nilai dan klasifikasi interaksi Kabupaten / Kota (*hinterland*) di Kedungsepur terhadap Kota Semarang (kota inti) Tahun 2019.

Kabupaten / Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jarak ke Kota Inti (km)	Nilai Interaksi (I)	Klasifikasi
1. Kab. Kendal	971.086	25	704.662.729,38	Sedang
2. Kab. Demak	1.162.805	27	723.407.468,64	Sedang
2. Kab. Semarang	1.053.786	15	2.124.093.022,73	Tinggi
4. Kota Salatiga	194.084	39	57.871.420.98	Rendah
5. Kab. Grobogan	1.377.788	56	199.255.340.30	Rendah

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah 2020 (diolah, 2020)

Setelah sebelumnya dilakukan perhitungan *Location Quotient* (LQ), konektivitas, aksesibilitas dan interaksi antar wilayah Kedungsepur, kemudian dilakukan perhitungan menggunakan formulasi teori titik henti yang dapat menentukan lokasi potensial di Kedungsepur. Penentuan lokasi potensial menggunakan analisis titik henti bertujuan untuk menetapkan batas pengaruh antar pusat pertumbuhan dari kota Inti di Kedungsepur yaitu Kota Semarang terhadap daerah sekitarnya termasuk terhadap kota lain yang lebih kecil (*hinterland*) yaitu Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga dan Kabupaten Grobogan. Pengaruh Kota Semarang

sebagai Kota Inti di Kedungsepur mempunyai batas jangkauan terhadap kawasan lainnya (Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga dan Kabupaten Grobogan) yang disebut titik henti. Kabupaten / Kota *Hinterland di Kedungsepur* berpengaruh pada jarak tertentu dari pusat kota (Kota Semarang).

Berdasarkan hasil perhitungan teori titik henti didapat beberapa titik lokasi potensial yang dapat dilihat pada tabel 6 dan gambar di lampiran 2 untuk dilakukan pengembangan wilayah di Kedungsepur dengan Kota Semarang sebagai kota inti dan Kabupaten – Kota lainnya berikut.

Tabel 6. Titik Henti Kabupaten – Kota *Hinterland* di Kedungsepur dari Pusat Kota (Kota Semarang).

Kabupaten / Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jarak ke Kota Inti (km)	Titik Henti (Km)
1. Kab. Kendal	971.086	25	21.13
2. Kab. Demak	1.162.805	27	24.01
2. Kab. Semarang	1.053.786	15	12.98
4. Kota Salatiga	194.084	39	19.22
5. Kab. Grobogan	1.377.788	56	52.15

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah 2020 (diolah, 2020).

Berdasarkan penelitian sebelumnya wilayah rencana pengembangan yang cukup potensial adalah Koridor Semarang-Kendal, Koridor Semarang-Demak, Koridor Semarang-

Ungaran-Salatiga, dan Koridor Semarang-Purwodadi (Martono, 2008; Minnatika dan Indrayati, 2019).

Kedua penelitian tersebut masih menunjuk pada area koridor pengembangan. Untuk melengkapi atau menambahkan mengenai penelitian sebelumnya, penelitian kali ini ditekankan pada satu titik kawasan (kecamatan) di Kabupaten – Kota Kedungsepur yang memiliki lokasi potensial dekat dengan jalan kolektor sehingga mempermudah distribusi baik bahan mentah, bahan setengah jadi maupun bahan jadi di kawasan industri di Kedungsepur. Berdasarkan temuan peneliti, lokasi potensial untuk optimalisasi pengembangan wilayah melalui interaksi keruangan antar Kabupaten – Kota di Kedungsepur berdasarkan analisis dan hasil perhitungan teori titik henti (*breaking point*) adalah :

1. Kabupaten Kendal di Kecamatan Kendal, Kecamatan Singorojo, Boja dan Kecamatan Limbangan;
2. Kabupaten Demak di perbatasan antara Kecamatan Demak dan Kecamatan Wonosalam;
3. Kabupaten Semarang di Kecamatan Ungaran Barat;
4. Kota Semarang di Kecamatan Banyumanik
5. Kabupaten Grobogan di Kecamatan Purwodadi

Lokasi potensial yang ditemukan oleh penulis di Kedungsepur menunjukkan bahwa wilayah perkotaan ini memiliki bentuk cenderung linier mengikuti jaringan jalan akan mempermudah akses pelayanan prasarana. Hal ini didukung oleh hasil perhitungan indeks konektivitas, aksesibilitas dan interaksi keruangan antar kabupaten – kota Kedungsepur yang menunjukkan wilayah maju. Hal tersebut menjadikan kawasan perkotaan ini potensial untuk dikembangkan kawasan industrinya sehingga pembangunan dan pengembangan sektor – sektor unggulan dapat dilakukan lebih merata di beberapa lokasi potensial dengan membentuk pola kerjasama regional antar kabupaten/kota di Kedungsepur.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan arahan pengembangan wilayah

Kedungsepur melalui interaksi keruangan antar Kabupaten – Kota:

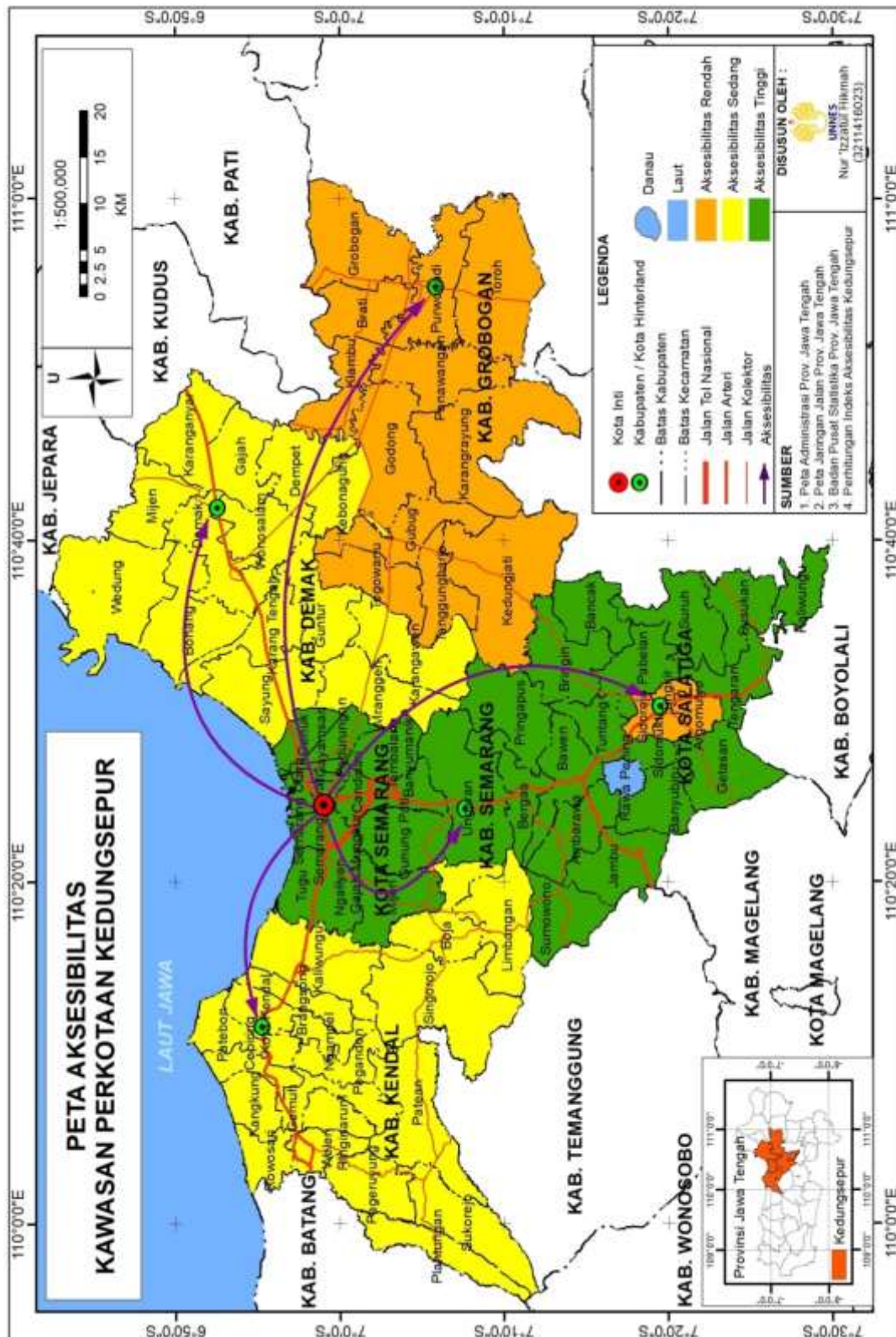
1. Kabupaten Kendal memiliki arahan pengembangan sektor basis yaitu Sektor Industri Pengolahan dengan lokasi potensial pengembangan di Kecamatan Kendal, Kecamatan Singorojo, Kecamatan Boja dan Kecamatan Limbangan atau pada Koridor Semarang-Kendal.
2. Kabupaten Demak memiliki arahan pengembangan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; dan Sektor Industri Pengolahan dengan lokasi potensial pengembangan di perbatasan antara Kecamatan Demak dan Kecamatan Wonosalam atau pada Koridor Semarang-Demak.
3. Kabupaten Semarang memiliki arahan pengembangan sektor basis yaitu Sektor Industri Pengolahan dengan lokasi potensial berada di Kecamatan Ungaran Barat atau pada Koridor Semarang-Ungaran-Salatiga.
4. Kota Salatiga memiliki arahan pengembangan sektor basis yaitu Sektor Jasa – Jasa; Sektor Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan dan Sektor Pengadaan Listrik, Gas dan Air Bersih dengan lokasi potensial pengembangan berada pada Koridor Semarang-Ungaran-Salatiga.
5. Kota Semarang memiliki arahan pengembangan sektor basis yaitu Sektor Konstruksi dan Sektor Pengangkutan dan Komunikasi di Kecamatan Banyumanik atau pada Koridor Semarang-Ungaran-Salatiga.
6. Kabupaten Grobogan memiliki arahan pengembangan sektor basis yaitu Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Sektor Pertambangan dan Penggalian; dan Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran di Kecamatan Purwodadi dan Kecamatan Brati atau berada pada Koridor Semarang-Purwodadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Fachrurrizal, Muhamad Isro, dan Rahma Hayati. 2014. "Pemilihan Lokasi Ibukota Kabupaten Di Wilayah Proyeksi Pemekaran Kabupaten Bekasi Utara." *Geo Image* 3(2): 1–7.

- Falah, Jhonata, dan Ariyani Indrayati. 2019. "Sebaran Keruangan dan Respon Warga Kota terhadap Layanan Online Smart Living menuju Semarang Smart City Tahun 2018." Prosiding Seminar Nasional Geografi UMS X 2019.
- Febrianto, Wimas Hasan, Saptono Putro, dan Hariyanto. 2017. "Trayek Angkutan Umum Untuk Mengoptimalkan Interaksi Desa Kota Di Kabupaten Boyolali." *Geo Image* 6(1).
- Giyarsih, Sri Rum. 2012. "Koridor Antar Kota Sebagai Penentu Sinergisme Spasial: Kajian Geografi Yang Semakin Penting." *Tatalokal* 14(2): 90–97.
- Hadi, Prayoga Luthfil, Tri Basuki Joewono, dan Wimpy Santosa. 2013. "Aksesibilitas Menuju Fasilitas Kesehatan Di Kota Bandung." *Jurnal Transportasi* 13(3): 213–22.
- Hariyanto, dan Tukidi. 2007. 'Konsep Pengembangan Wilayah dan Penataan Ruang Indonesia di Era Otonomi Daerah'. Dalam *Jurnal Geografi*. Vol.4 No.1. Hal. 1-10.
- Hikmah, Nur 'Izzatul. 2018. "Local Wisdom of Farmers on The Northern Slopes of Ungaran Mountain to Reduce Erosion on Agricultural Land." *Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)* 313(ICoRSIA 2018): 290–93.
- Indrayati, Ariyani. 2010. Studi manajemen infrastruktur perkotaan berbasis komunitas, kasus manajemen MCK komunal di bantaran sungai Kota Yogyakarta (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Indrayati, Ariyani. 2011. Pola Distribusi Keruangan MCK Komunal dan Hubungannya dengan Kawasan Kumuh di Perkotaan Yogyakarta. *Jurnal Geografi: Media Informasi Pengembangan dan Profesi Kegeografian*, 8(1), 54-63.
- Martono, Primasto Ardi. 2008. Tesis Pascasarjana Magister Program Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro "Keterkaitan Antar Sektor Ekonomi Dan Antar Daerah Di Wilayah Kedungsepur."
- Minnatika, Nella. dan Indrayati, Ariyani. 2019. "Transformasi Spasial Pada Koridor Perkotaan Kedungsepur. *Geo-Image*.
- Mustafa, Arnisa, Murshal Manaf, dan Agus Salim. 2018. "Interaksi Keruangan Kawasan Perkotaan Tanete Dan Implikasinya Terhadap Pelayanan Transportasi Spatial Interaction of Urban Tanete Areas and Its Implications for Transportation Services." *PBUP* 1(1): 1–9.
- Muta'ali, Luthfi. 2015. Teknik Analisis Regional Untuk Perencanaan Wilayah, Tata Ruang dan Lingkungan. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029
- Robingatun, Rahma Hayati, dan Ariyani Indrayati. 2014. "Daya Saing Wilayah Dan Sektor Unggulan Sebagai Penentu Pusat Pertumbuhan Baru Orde II Di Kabupaten Purworejo." *Geo Image* 3(1).
- Rofiatul, Ulya Meiliana, Hariyanto, dan Putro Saptono. 2018. "Tingkat Kebutuhan Penduduk Terhadap Angkutan Umum Perkotaan di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan." *Geo-Image* 7(1): 54-62.
- Roucek, Joseph S. 1963. "Changing Concepts and Recent Trends in American Educational Sociology." *Revista Internacional de Sociología* 21: 217.
- Sanditia, Eka Mayang, Whinarko Juliprijanto, dan Rusmijati. 2017. "Analisis Disparitas Pendapatan Per Kapita Dengan Pendekatan Sektoral Antar Wilayah Kedungsepur Tahun 2010-2017." *DINAMIC: Directory Journal of Economic* 1: 168–81.
- Short, J.R. 1984 *An Intriduction to Urban Geoghraphy*. London: Routladge and Kegen Paul.

Lampiran 1. Peta Aksesibilitas Kawasan Perkotaan Kedungsepur



Lampiran 1. Peta Lokasi Potensial Arahkan Pengembangan Wilayah Kedungsepur

